

### **BAB III**

#### **SETTING PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Desa Montor**

##### 1. Sejarah Singkat Desa Montor

Desa Montor adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Banyuates Sampang Madura. Desa ini secara kuantitas penduduk termasuk desa yang padat dengan memiliki 4.320 penduduk dengan rincian, 2200 penduduk laki-laki dan 2.120 penduduk perempuan.<sup>1</sup>

Penamaan desa Montor sendiri, konon pada zaman dahulu pernah didatangi seorang raja asli Bangkalan. Setelah raja sampai di desa Montor, masyarakat menyambutnya dengan ramah dan sambutan meriah. Walaupun raja termasuk orang ‘besar’, raja tersebut tetap disuguhi dengan suguhan yang sederhana, yaitu *temon* (Mentimun; Indonesia) dan *oto*’ (Kacang panjang; Indonesia). Berawal dari itulah, desa ini pada awalnya dikenal dengan *Monto*’ yang merupakan kepanjangan dari *temon* dan *oto*’. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada akhirnya sebutan desa ini berubah menjadi Montor.<sup>2</sup>

Sampai detik ini, desa ini tidak berubah nama dan sudah tercatat di kecamatan maupun di kabupaten dengan nama Montor. Desa ini memiliki 7 dusun dengan penduduk yang variatif, yaitu dusun Brumbung, Sabe Jeruk, Berek Sabe, Kolbukol, Korbukor, Plarbaan, dan Pokolan.

---

<sup>1</sup> Badan informasi statistik kecamatan Banyuates 2011

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Nur Hasan selaku carek desa Montor

## 2. Letak Geografis

Secara geografis, desa Montor termasuk daerah yang lumayan rendah dibanding dengan desa-desa yang ada. Toh walaupun ada pegunungan namun secara geografis desa ini masuk pada desa persawahan. Desa ini dibatasi oleh beberapa desa di sekitarnya yaitu:

Sebelah barat : Desa Morbatoh

Sebelah timur : Desa Tebenah

Sebelah selatan : Desa Nagasari

Sebelah utara : Desa Batioh

Sebagaimana telah disebutkan bahwa secara umum, desa ini dapat dibidang sebagai desa yang rendah dan memiliki dua iklim sebagaimana umumnya iklim di Madura, khususnya Sampang, yaitu musim *nambere'* (penghujan) dan musim *nemor* (panas). Ketika musim panas tiba, desa ini tidak terlalu sulit mencari air karena setiap warga hampir semuanya memiliki sumur sendiri-sendiri. Di samping itu, air sungai yang sangat besar biasanya tidak sampai habis, lebih-lebih di bagian timur desa Montor karena ada aliran sungai yang cukup besar dan terus berisi air. Sedangkan di bagian barat desa, sedikit lebih gersang dan mengandalkan air sumur.

Tapi sebaliknya, ketika musim *nambere'* tiba, desa ini menjadi lebih subur dan semua lahan ditanami dengan aneka tanaman, mulai dari ubi-ubian, jagung, padi, tembakau dan yang lainnya. Bahkan ada beberapa dusun yang harus bersiap dengan datangnya banjir ketika musim penghujan telah tiba, khususnya dusun yang terletak di sawahan.

### 3. Pencapaian Masyarakat

Sebagaimana masyarakat di Banyuwates pada umumnya, mata pencapaian masyarakat di desa Montor lebih cenderung bergantung pada pertanian sebagai masyarakat agraris. Pola dan macam pertanian inilah yang memberikan sumbangan berarti dalam masyarakat sekitar, mulai dari jagung, padi, tembakau, kacang-kacangan, ubi, ketela, singkong, dan lainnya.

Di samping itu, sebagai alternatif pencapaian masyarakat cukup variatif semisal peternakan, perdagangan, usaha kerajinan atau *home industry*, kuli, pembuatan senjata tajam seperti, *todi'* (pisau), *are'* (celurit), dan lainnya.<sup>3</sup>

### 4. Agama Masyarakat

Masyarakat Sampang, termasuk di desa Montor, terkenal dengan orang yang berpegang teguh pada agama islam sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya. Di desa Montor sendiri, bisa dipastikan seluruh penduduk beragama islam. Hal itu dibuktikan dengan tidak adanya tempat-tempat ibadah kecuali masjid sebagai tempat ibadah orang islam.<sup>4</sup>

### 5. Tingkat pendidikan Masyarakat

Secara pendidikan, masyarakat di desa Montor dapat dikatakan sudah mulai stabil. Stabil dalam artian seluruh masyarakat sudah pernah mengenyam dunai pendidikan *toh* walaupun hanya dalam tataran SD, ada pula yang lulus MTs, dan MA. Sepuluh tahun terakhir, desa ini sudah dapat dibilang lebih maju dari sebelumnya, karena telah memiliki paling tidak 24 sarjana.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan H. Tamam selaku tokoh masyarakat di desa Montor pada tanggal 13 Desember 2012, jam: 11.20

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan H. Fauzi, pada tanggal 12 Desember 2012, jam: 11.30

Tabel 1  
Pendidikan Masyarakat desa Montor

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1360
2	SMP/MTs	890
3	SMA/MA	650
4	Sarjana	24
5	Tidak sekolah	711
6	Pengangguran	678

#### 6. Politik dalam Masyarakat

Memang tidak dapat dipungkiri, dewasa ini wacana politik bukan hanya dapat dinikmati oleh orang-orang kota, akan tetapi di masyarakat pedesaan pun sudah mulai dijamah oleh yang namanya politik. Walaupun intensitasnya berbeda dengan di perkotaan, namun politik di pedesaan sudah mulai mengakar dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk di desa Montor Banyuates Sampang Madura ini.

Politik bagi masyarakat Montor hakikatnya adalah media untuk menjadikan desa yang lebih baik, bukan sebaliknya.<sup>5</sup> Begitu juga menurut Abdussalam, politik bukan arena untuk adu kekuatan atau adu massa dan pendukung.<sup>6</sup> Politik harus dimaknai sebagai jalan dalam mencari format desa yang benar-benar mensejahterakan masyarakatnya, memberikan pendidikan yang gratis, membuat kebijakan-kebijakan yang adil bukan untuk pribadi.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan bapak Turhamun selaku perangkat desa, pada tanggal 13 Desember 2012, jam: 12.00

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Abdussalam, pada tanggal 13 Desember 2012, jam: 12.10

Walau demikian, tidak seluruh masyarakat ganderung pada politik. Di tengah masyarakat hanya sebagian saja yang terjun dalam politik praktis, misalnya masuk partai. Sedangkan masyarakat mayoritas tidak tahu menahu tentang politik. Mereka tahu hanya ketika ada momen-momen seperti pemilihan presiden, wakil rakyat, bupati, hingga pemilihan kepala desa. Bagi mereka, memperjuangkan hidup, mencari uang dan bekerja merupakan pekerjaan utama. Bahkan dalam taraf tertentu, bagi mereka politik hanya media pertenggaran.<sup>7</sup>

Perkembangan politik di desa Montor dapat dilihat dari eksistensi partai politik yang ada. Partai politik di desa ini cukup variatif, yaitu:

Tabel 2<sup>8</sup>  
Partai Politik di Desa Montor

No	Partai Politik	Persen
1	Partai kebangkitan bangsa (PKB)	20 %
2	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	17 %
3	PKNU	16 %
4	Golkar	9 %
5	PDIP	9 %
6	PAN	5 %
7	Hanura	5 %
8	Gerindra	3 %
9	Demokrat	6 %

<sup>7</sup> Pendapat tersebut dikatakan oleh Halil salah satu masyarakat di Desa Montor, wawancara pada tanggal 13 Desember 2012

<sup>8</sup> Didapat dari Komisi Pemilihan Umum kecamatan Banyuates 2011.

## 7. *Blater* di Desa Montor

Di samping petani, pedagang, tukang besi, dan kuli, di desa Montor ada kelompok masyarakat yang dikenal dengan orang *blater*. Istilah *blater* populer di Madura bagian barat yaitu Sampang dan Bangkalan.<sup>9</sup> Sedangkan di Sumenep dan Pamekasan, istilah *blater* kurang terkenal karena di sana memakai kata *bejingan*. *Blater* sendiri berarti orang yang memiliki kekuatan baik fisik maupun magis, ahli kanuragan, pemberani, dan sepertinya tidak takut mati. Dalam masyarakat Sampang, orang *blater* justru dikenal dengan kekuatannya.

Secara sosial, orang *blater* di desa Montor memiliki peran yang cukup strategis. Orang *blater* dipersepsikan dapat menjadi pelindung bagi masyarakat dari orang-orang *blater* di desa lain yang terkadang mengganggu kehidupan mereka. Tapi di sisi yang berbeda, orang *blater* terkadang menjadi ‘pengancam’ bagi masyarakatnya, utamanya ketika ada momen-momen berharga seperti pemilihan kepala desa dan semacamnya. Tidak jarang orang *blater* di desa ini yang membuat kericuhan ketika ada acara seperti orkes melayu dan lainnya.

Sosok seorang *blater* juga memiliki jaringan yang luas baik antar desa bahkan antar kabupaten. Daya karisma dan jaringan yang dimiliki tersebut menciptakan pengaruh yang luar biasa di mata masyarakat. Oleh karenanya, masyarakat merasa sungkan jika bertemu dengan seorang *blater*. Menurut Rozaki setidaknya terdapat dua proses kultural seseorang memperoleh

---

<sup>9</sup> Lihat Abdur Rozaki, *Menabur Kharisma Menuai Kuasa*, Jogjakarta: Pustaka Marwa, 2004, hal: 09

predikat *blater*.<sup>10</sup> *Pertama*, kemampuan dalam ilmu kanuragan, sikap pemberani dan jaringan pertemanan yang luas dipergunakan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sekitarnya. Sukses meraih kemengan dalam *carok*, serta keberhasilan dalam meleraikan konflik adalah contoh dari orang *blater* tipe ini.

*Kedua*, keterlibatannya dalam dunia kriminalitas dan aksi kekerasan lainnya baik secara langsung maupun tidak.<sup>11</sup> Memang perlu diakui bahwa orang *blater* di desa Montor juga sering kali terlibat dalam kriminalitas dan pencegahan terjadinya kriminalitas. Menurut pengakuan Sidan, dia pernah terlibat dalam kasus pencurian sepeda motor di desa sebelahnya, akan tetapi dia juga pernah menjadi pahlawan dengan meleraikan *carok* yang terjadi di tengah masyarakatnya yang berlangsung sejak lama. Kalau tidak ada saya mungkin salah satu di antara mereka sudah ada yang tewas, bahkan semuanya, begitulah pengakuannya.<sup>12</sup>

Di samping kriteria di muka, masyarakat *blater* juga memiliki tradisi yang tidak dimiliki oleh masyarakat lainnya. Tradisi dimaksud merupakan perpaduan antara pemenuhan kepentingan yang sedang dibutuhkan dengan sentuhan kreativitas melalui media permainan dan seringkali dengan cara memanfaatkan potensi-potensi yang terdapat di dalam lingkungannya. Misalnya, permainan yang sangat populer dan diganderungi oleh sebagian masyarakat Madura yaitu *kerapan sapeh* (karapan sapi), adu ayam, mabuk-

---

<sup>10</sup> Ibid, no 11

<sup>11</sup> Ibid, no 12

<sup>12</sup> Sidan bukan nama sebenarnya, hasil wawancara pada tanggal 14 Desember 2012 dengan salah satu preman/blater di desa Montor.

mabukan hingga menagih upah bagi para kuli yang ada di pasar, tempat parkir, dan yang lainnya.

Aktor utama dalam permainan semacam itu adalah para preman atau *blater*. Karena menjadi aktor, maka merekalah yang memegang kendali hingga permainan selesai. Keuntungan pun paling banyak diperoleh para *blater*, sedangkan masyarakat biasa hanya menjadi penonton setia dan tidak mendapatkan apa-apa. Hiburan permainan semacam itu juga bukan tidak berarti bagi para *blater*, akan tetapi penuh makna dan tujuan. Di samping bertujuan sebagai hiburan, tradisi semacam itu juga dijadikan sebagai media untuk membangun pertemanan hingga menjadi lebih erat, mencari *networking* atau jaringan, bahkan menjadi media untuk memperoleh dan memperbaiki status *keblateran* mereka.

Artinya, diakui atau tidak, orang *blater* di desa Montor memiliki peran dan pengaruh dalam masyarakatnya. Baik pengaruh itu berimplikasi positif maupun negatif sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Bukan hanya dalam ranah sosial, dalam politikpun mereka tidak jarang ikut berpartisipasi di dalamnya. Menurut penuturan Muarif:

Ya banyak yang ikut terlibat di dalam politik walaupun tidak secara keseluruhan. Karena momen politik bagi para *blater* merupakan tempat untuk menunjukkan kemampuan dirinya, memperbaiki desa, di samping juga ada yang ingin memperoleh penghasilan tambahan dari pemilu tersebut.<sup>13</sup>

Dalam pemilu, mengait orang *blater* sepertinya menjadi keharusan bahkan kewajiban, karena mereka dapat difungsikan untuk memperbanyak

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Muarif selaku perangkat desa, yang kemudian dikuatkan juga oleh penuturan salah satu orang *blater* di desa ini, pada tanggal 14 Desember 2012.



suara dengan anak buahnya dan juga dapat dijadikan ‘tameng’ ketika ada percekocokan dalam proses pemilu. Tidak jarang pula, seorang calon dalam pemilu mengangkat orang *blater* yang cukup terkenal sebagai tim suksesnya. Bahkan, sebagaimana hasil penelitian Abdur Rozaki, kiai sekalipun memiliki hubungan erat dengan orang *blater* baik itu dalam lingkup sosial, budaya, agama dan lebih-lebih dalam politik.

Intinya, masyarakat *blater* di desa Montor menjadi kenyataan yang tidak dapat ditolak dan harus diterima adanya. Kekuatan dan keberanian para *blater* menjadi modal utama bagi mereka sehingga mereka memiliki peran dan pengaruh yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk di dalam ranah politik.

## **B. Hubungan Pilkades dengan Premanisme**

Pemilihan kepala desa sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi di negeri ini tidak lepas dari peran serta seluruh lapisan masyarakat di dalamnya. Sebagai masyarakat yang majemuk, tentunya akan banyak gesekan antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Dari gesekan tersebut, tidak jarang memunculkan terjadi pergolakan politik yang pada ujungnya bisa bermuara pada terjadinya premanisme.

Begitu juga dengan pilkades yang dilaksanakan di desa Montor Sampang Madura. Dalam prosesnya, tidak jarang momen pilkades menjadi ruang terjadinya premanisme politik. Inilah kemudian yang menjadi pertanyaan besar: apa sebenarnya hubungan pilkades dengan premanisme?.

Melalui penelitian di lapangan, memang harus diakui bahwa antara pilkades dengan premanisme di desa Montor memiliki hubungan yang sangat erat, dan bahkan tidak bisa dipisahkan. Hal itu terbukti dengan terjadinya premanisme politik setiap momentum politik digelar, seperti pemilihan kepala desa, pemilihan Bupati, pemilihan gubernu, pemilihan anggota Dewan, hingga pemilihan Presiden.

Menurut pengamatan penulis, hubungan antara pilkades dan premanisme (tentunya di pemilu lainnya) lebih bersifat sebab akibat. Artinya, politik kekuasaan yang selama ini banyak dianut oleh para politisi sering kali melampaui batas-batas normal. Dengan begitu, terjadilah politik yang kurang sehat dan tidak pada jalur yang semestinya. Dalam hal ini, politik dapat dikatakan menjadi sebab terjadinya tindakan-tindakan yang amoral semacam premanisme. Sedangkan premanisme sendiri adalah akibat dari tindakan politik yang amoral dimaksud.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan dunia preman yang ada di desa Montor, maka hubungan antara preman dengan politik lebih bersifat mutual, dalam arti saling membutuhkan. Politisi membutuhkan para preman yang melakukan premanisme untuk menguatkan peran politik mereka, sedangkan para preman membutuhkan politisi untuk meraup keuntungan finansial sekaligus memperbesar nama dan keterkenalannya.

### **C. Proses Pemilihan Kepala Desa**

Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pilkades merupakan gambaran Pemilu langsung di Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya justru Pilkades

menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan sistem pemilihan umum di Indonesia. Bahkan di banyak desa di berbagai daerah di Indonesia termasuk di madura, biaya pemilihan kepala desa dibebankan kepada para calon kepala desa. Padahal pemilihan kepala desa adalah agenda pemerintah yang seharusnya dibiaya dari anggaran negara/daerah. Hal ini bisa jadi penyebabnya di antaranya adalah karena belum dimasukkannya pemilihan kepala desa secara langsung dalam rezim pemilihan umum.

Padahal dari berbagai instrumen pemilihan kepala desa sebagaimana diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Bab XI dan dalam PP No. 72 tahun 2005 tentang desa, pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dikatakan sama dengan pemilihan umum. Asas-asas pelaksanaan pilkades sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP No. 72 tahun 2005 sama persis dengan Asas-asas pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen. Dari sisi persyaratan pemilih juga dapat dikatakan sama antara pemilih Pilkades, dan pemilih dalam pemilu, termasuk dalam mekanisme penggunaan hak pilih, persyaratan dan tata cara pencalonan, dan lain-lain.

Dalam UUD 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada satu ketentuanpun yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Bahkan pengaturan tentang Desa-pun secara eksplisit juga tidak ditemukan dalam UUD 1945, walaupun sebenarnya Desa dan Sistem Pemerintahanya mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat semua masyarakat

bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Istilah desa dalam UUD 1945 sebelum amandemen dapat kita jumpai dalam Pasal 18 dan penjelasannya, yang berbunyi sebagai berikut:

“ Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak asal- usul dalam daerah yang bersifat istimewa”.

Sedangkan setelah amandemen, Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi, dan daerah provinsi itu di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan undang- undang” .

Berdasarkan Pasal 18 di atas, maka kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang dalam Pasal 200 ayat (1) dibentuklah Pemerintahan Desa, yang berbunyi:

”Dalam Pemerintahan daerah kabupaten / kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.”

Desa atau Pemerintahan desa dipimpin oleh seorang Kepala desa yang dipilih langsung dari dan oleh penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 203 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi:

” Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara

pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah”.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa, di Bagian Keempat diatur tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu mulai dari Pasal 43 sampai dengan Pasal 54. Dalam Pasal 46 PP No. 72 tahun 2005 tersebut diatur sebagai berikut:

- a) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- b) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- c) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.

Sedangkan untuk pemilihan diatur dalam Pasal 45, yang berbunyi sebagai berikut:

”Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.” Adapun untuk pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa akan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota yang bersangkutan.<sup>14</sup>

Berdasar pada undang-undang tersebut, penyelenggaraan pemilihan kepala desa mengadakan pemilu. Karena bagaimanapun, kepala desa dalam sebuah desa memiliki perans sentral utamanya terkait dengan mengawal perubahan menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik. Adapun tahapan-tahapan pemilihan kepala desa yang terjadi di desa Montor adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Pasal 53 PP Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

### 1. Pembentukan Panitia

Pembentukan panitia dimaksudkan agar terselenggaranya pemilihan kepala desa Montor dapat berjalan sesuai dengan *daedline* yang telah ditentukan. Di samping juga, panitialah yang akan mengurus hal ihwal mulai pra pemilihan hingga proses pemilihan selesai. Pembentukan panitia di desa Montor ini dilakukan pada tanggal 15 November oleh Badan Perwakilan Desa (BPD), yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan wakilnya, bendahara, keamanan, humas, dan perlengkapan.<sup>15</sup>

### 2. Penjaringan bakal calon

Penjaringan bakal calon dilakukan oleh panitia selama kurang lebih sepuluh hari yaitu pada tanggal 17-29 November. Dalam hal ini, panitia mengumumkan ke seluruh masyarakat yang berminat untuk mencalonkan dirinya dalam pemilihan kepala desa Montor periode 2012-2017 dengan memberikan persyaratan-persyaratan sebagaimana telah ditentukan sebelumnya melalui kesepakatan bersama panitia.

### 3. Penetapan bakal calon

Setelah itu, beberapa calon yang mendaftar dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan kemudian ditetapkan sebagai calon dalam pemilihan kepala desa Montor. Ada lima bakal calon yang mendaftar dan ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa yaitu Timun, Maliki, H. Hasun, Martelan, dan Morben yang merupakan calon *incumbent*.

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Martelan salah satu kandidat yang gagal dalam pemilihan kepala desa Montor, pada tanggal 14 Desember 2012, jam: 08.35

#### 4. Masa Kampanye

Kampanye adalah media untuk menarik masa dengan berbagai cara selama sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Masa kampanye di desa montor berlangsung pada tanggal 11-19 Oktober 2012. Dalam kampanye, para calon diharuskan memberitahukan visi dan misinya jika mereka terpilih dalam pemilu yang juga diikuti dengan media-media kampanye lainnya. Cara-cara kampanye pun telah ditentukan dan ada aturannya masing-masing, sehingga jika ada yang melanggar aturan tersebut diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

#### 5. Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sebelum melakukan pemungutan dan penghitungan suara, para calon kepala desa diberikan masa tenang. Setelah masa tenang baru kemudian dilakukan pemungutan suara. Dalam kaitan ini, warga desa yang telah terdaftar sebagai pemilih dan mendapat surat undangan datang di tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan langsung, umum, bebas dan rahasia (LUBER), dan jujur serta adil (JURDIL). Berikut tabel hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilihan kepala desa Montor.

Tabel 3  
Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara

No	Nama calon	Gambar	Hasil angka	Hasil persen
1	Timun	Padi	172	2 %
2	Maliki	Jagung	282	5 %
3	H. Hasun	Mangga	193	2,5 %
4	Martelan	Manggis	1113	40 %
5	Morben	Pisang	1373	45 %
6	Tidak Sah	-	50	0,3 %
7	Gol Put	-	259	5 %

#### 6. Pengumuman dan Penetapan Kepala Desa

Setelah dilakukan penghitungan suara dengan disaksikan langsung oleh beberapa saksi dan masyarakat, maka diumumkanlah hasilnya yaitu dengan bapak Morben sebagai pemenangnya. Kemenangannya dengan mendapat 1373 suara tersebut menjadi kesempatan kedua kalinya untuk memimpin desa Montor hingga tahun 2017.

#### 7. Pengesahan dan pelantikan

Setelah pemenang ditetapkan, maka kepala desa dan wakil kepala desa Montor terpilih kemudian disahkan oleh komisi pemilihan dan dilantik oleh Camat Banyuates. Dengan pelantikan tersebut, menjadi tanda bagi kepala desa yang baru dipilih untuk melanjutkan perjuangannya untuk mensejahterakan masyarakatnya dan rela menjadi pemimpin dan wakil masyarakatnya.